

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Setiap daerah membutuhkan kantor pemerintahan daerah, karena kantor pemerintahan daerah memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan proses pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Penyusunan rencana pembangunan di tingkat kota dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Unsur pembangunan mencakup sosial, ekonomi dan politik, hingga adanya penyesuaian dengan konservasi lingkungan untuk mendorong pembangunan yang berkelanjutan.

Pembangunan berkelanjutan didukung dengan ditetapkannya *Sustainable Development Goals* (SDGs) oleh PBB untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan di tingkat global. Penerapan SDGs pada kantor pemerintah tidak hanya pada implementasi sistem kerjanya saja, tetapi juga berperan sebagai ruang yang inklusif dan berkelanjutan. Pemerintah Indonesia menjadikan SDGs sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional, dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2017 mengenai Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Hingga saat ini, pemerintah daerah telah melaksanakan SDGs secara mandiri berdasarkan kapasitasnya. Salah satunya adalah Pemerintah Kota Sukabumi.

Bappeda Kota Sukabumi saat ini telah menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2025, berkaitan dengan rencana pembangunan kota inklusif dan berkelanjutan di Kota Sukabumi. Namun berdasarkan *Scorecard* pencapaian indikator pada *Kesiapan SDGs Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat*, Kota Sukabumi menghadapi beberapa tantangan untuk mencapai SDGs tahun 2030, diantaranya perekonomian dan ketimpangan pembangunan berkelanjutan, sosial budaya, serta digitalisasi dan teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (Bappenas) menyampaikan bahwa dengan adanya penguatan fondasi kelembagaan yang tepat fungsi dan kolaboratif serta peningkatan kualitas ASN berkontribusi besar sebagai pendorong pencapaian indikator SDGs lainnya. Dalam hal ini, produktivitas pegawai pemerintah perlu ditingkatkan untuk mendukung berjalannya pekerjaan menjadi lebih dinamis dan

efisien. Selain itu, untuk mendukung kegiatan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pembangunan membutuhkan tempat yang sesuai dan dilengkapi dengan fasilitas yang memadai. Menurut Gie (2007), pengaturan ruang kantor merupakan salah satu faktor penting yang mendukung kelancaran aktivitas dalam melaksanakan tata usaha. Oleh karena itu, pentingnya diterapkan penataan ruang kantor yang tepat di instansi pemerintah.

Objek pada perancangan ulang ini adalah Kantor Bappeda Kota Sukabumi, yang berlokasi di Jl. Sarasa No.9, Babakan, Kecamatan Cibereum, Kota Sukabumi. Berdasarkan observasi lapangan, ditemukan beberapa permasalahan dalam lingkup interior yang menghambat kenyamanan dan aktivitas para pegawai. Permasalahan pertama ini terkait dengan furniture, yaitu tata letak furniture yang kurang tepat pada beberapa ruangan seperti peletakkan meja dan kursi yang arahnya tidak jelas sehingga seringkali menghalangi alur sirkulasi pegawai dalam melakukan pekerjaan, serta adanya penumpukan berkas-berkas di meja kerja maupun lantai pada beberapa ruangan karena kurangnya tempat penyimpanan, sehingga menciptakan kesan ruang yang berantakan. Berikutnya permasalahan terkait persyaratan umum ruang, kurangnya sarana keamanan dan keselamatan pada kantor, karena kantor ini hanya memiliki sistem keamanan berupa CCTV saja. Hal ini belum sesuai dengan standar sistem keamanan pada gedung perkantoran khususnya kantor pemerintah yang dikeluarkan oleh Permenkes. Kemudian permasalahan terkait konsep visual, yaitu penggunaan warna-warna mencolok sebagai identitas ruang hanya terdapat pada ruang Kepala Bidang yang berada di dalam ruang Bidang. Hal ini kurang efektif karena ruang Kepala Bidang merupakan area privat yang tidak dapat dilihat oleh umum sehingga “identitas” yang dimaksud kurang sesuai. Selain itu, kurangnya fasilitas yang memadai dan menunjang kebutuhan para pegawai, seperti tidak adanya ruang istirahat, area percetakan dan pantry khusus di setiap ruang.

Berdasarkan fenomena dan permasalahan yang dijabarkan diatas, maka diperlukannya perancangan ulang pada interior Kantor Bappeda Kota Sukabumi dengan menggunakan pendekatan aktivitas. Dengan dilaksanakannya perancangan ulang ini diharapkan dapat memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi para pegawai untuk mendukung aktivitasnya dengan pengoptimalan pelaksanaan SDGs. Selain itu, perancangan ulang ini akan menciptakan lingkungan kerja kantor yang lebih baik dan efisien agar terbentuknya interaksi kerja yang baik antar pegawai.

1.2 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN

Dari hasil yang telah diuraikan pada latar belakang, maka dapat dipahami identifikasi masalah pada Kantor Bappeda Kota Sukabumi, yaitu:

- a) Furniture
 - Tata letak furniture yang kurang tepat pada beberapa ruangan, seperti peletakkan meja dan kursi yang arahnya tidak jelas, sehingga seringkali menghalangi alur sirkulasi pegawai dalam melakukan pekerjaan
 - Adanya penumpukan berkas-berkas di meja kerja maupun lantai pada beberapa ruangan karena kurangnya tempat penyimpanan, sehingga menciptakan kesan ruang yang berantakan
- b) Konsep Visual
 - Penggunaan warna-warna mencolok yang dijadikan sebagai identitas ruang hanya terdapat pada ruang Kepala Bidang yang berada di dalam ruang Bidang, hal ini kurang efektif karena ruang Kepala Bidang merupakan area privat yang tidak dapat dilihat oleh umum sehingga “identitas” yang dimaksud kurang tepat
- c) Fasilitas
 - Kurangnya fasilitas yang memadai dan menunjang kebutuhan para pegawai, seperti tidak adanya ruang istirahat, area percetakan dan pantry khusus di setiap ruang/lantai
- d) Persyaratan Umum Ruang
 - Kurangnya sarana keamanan dan keselamatan pada kantor, karena kantor ini hanya memiliki sistem keamanan berupa CCTV saja, sehingga belum sesuai dengan standar sistem keamanan pada gedung perkantoran

1.3 RUMUSAN PERMASALAHAN

Dari penjelasan mengenai identifikasi masalah yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan rumusan masalah dari perancangan ulang interior Kantor Bappeda Kota Sukabumi, sebagai berikut:

- a) Bagaimana merancang interior pada Kantor Bappeda Kota Sukabumi dengan penataan ruang yang tepat untuk memaksimalkan aktivitas para pegawai?

- b) Bagaimana merancang sarana dan prasarana untuk menunjang kebutuhan para pegawai?
- c) Bagaimana menerapkan persyaratan umum ruang pada Kantor Bappeda Kota Sukabumi yang baik dan sesuai dengan standarisasi yang berlaku?

1.4 TUJUAN DAN SASARAN PERANCANGAN

1.4.1 Tujuan

Tujuan dari perancangan ulang interior Kantor Bappeda Kota Sukabumi adalah untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi para pegawai dalam mendukung aktivitas mereka serta menciptakan ruang kantor yang efisien yang dapat mengoptimalkan interaksi antara pegawai untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik.

1.4.2 Sasaran

Sasaran dari perancangan ulang interior Kantor Bappeda Kota Sukabumi adalah sebagai berikut:

- a. Merancang interior pada Kantor Bappeda Kota Sukabumi dengan penataan ruang yang tepat untuk memaksimalkan aktivitas para pegawai
- b. Merancang sarana dan prasarana untuk menunjang kebutuhan para pegawai
- c. Menerapkan persyaratan umum ruang pada Kantor Bappeda Kota Sukabumi sesuai dengan standar yang berlaku

1.5 BATASAN PERANCANGAN

Batasan perancangan ulang pada interior Kantor Bappeda Kota Sukabumi adalah sebagai berikut:

- a. Lokasi objek perancangan berada di Jl. Sarasa No.9, Kecamatan Cibereum, Kota Sukabumi.
- b. Batasan Luasan Perancangan:
Bangunan kantor terdiri dari dua lantai yang terdapat pada dua bangunan gedung yang dihubungkan dengan sebuah ruang di lantai 2, bangunan utama terdapat area ruang kerja, ruang pertemuan, dan lounge. Sedangkan bangunan lainnya terdapat Ruang *Media Center* pada lantai 1, dan penambahan ruangan baru yaitu Ruang Pertemuan 2 pada lantai 2. Dan satu bangunan lainnya yang hanya terdiri dari satu lantai, yaitu

Ruang *Record Center* dan Ruang *Server*. Batasan perancangan yaitu hanya pada bangunan utama.



Gambar 1.1 Batasan Perancangan

(Sumber: Pribadi 2024)

NO	RUANG	LUAS (m ²)
Lantai 1		
	Resepsionis	12 m ²
	Lobby	216 m ²
	Ruang Kepala Bappeda	57,6 m ²
	Ruang Sekretaris	52 m ²
	Ruang Sekretariat Bappeda	115,2 m ²
	Ruang Bidang Penelitian dan Pengembangan	115,2 m ²
	Ruang Pertemuan Utama	115,2 m ²
	Toilet	43,2 m ²

Lantai 2		
	Ruang Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	115,2 m ²
	Ruang Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	115,2 m ²
	Ruang Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	115,2 m ²
	Ruang Infrastruktur dan Kewilayahan	115,2 m ²
	Ruang Pertemuan Atas	57,6 m ²
	Koridor	156,6 m ²
	Toilet	43,2 m ²
Total		1,440 m²

c. Batasan Pengguna Ruang:

Pengguna ruang meliputi pegawai Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, *security*, dan *cleaning service*, serta pengunjung baik yang merupakan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) maupun masyarakat umum yang memiliki kepentingan.

d. Batasan Dalam Pendekatan Desain:

Pendekatan aktivitas yang digunakan dalam perancangan ulang interior kantor ini dengan menganalisis aktivitas dan kebutuhan pengguna pada kantor.

e. Batasan Peraturan / Standarisasi:

Peraturan dan standarisasi yang digunakan relevan dengan objek perancangan.

1.6 METODE PERANCANGAN

Tahapan metode perancangan yang digunakan untuk perancangan ulang pada interior Kantor Bappeda Kota Sukabumi dilakukan dengan menggunakan metode pengumpulan data yang mencakup data primer dan data sekunder, serta metode analisis data. Pengumpulan data primer dilakukan melalui survei dan observasi terhadap objek perancangan, dokumentasi serta wawancara. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan memanfaatkan literatur yang diperoleh melalui buku-buku dan standar kantor menurut para ahli dan peraturan Menteri, serta dengan merujuk pada hasil studi banding dan studi preseden.

1.6.1 Tahapan Pengumpulan Data Primer

1. Survey dan observasi objek perancangan

Mengumpulkan data yang diperoleh dari instansi mengenai data-data yang ada dari objek terkait. Untuk mendapatkan data-data tersebut, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Sukabumi menginginkan penulis untuk mengajukan surat pengantar sehingga diizinkan.

Data-data yang didapatkan langsung dari instansi adalah:

- Salinan digital denah bangunan Kantor Bappeda Kota Sukabumi
- Daftar pegawai tetap dan pegawai tidak tetap Kantor Bappeda Kota Sukabumi

Observasi dilakukan dengan mengamati objek secara langsung dan rinci untuk memperoleh data yang diperlukan terkait dengan objek tersebut. Objek yang diamati dalam observasi harus merupakan objek yang nyata sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

2. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan agar dapat menyediakan dokumen dengan bukti yang akurat. Penulis melakukan kegiatan dokumentasi di seluruh bangunan mulai dari keadaan interior hingga eksterior bangunan. Sehingga mendapatkan bukti-bukti yang akurat untuk dilanjutkan ke proses analisa bangunan ruang Kantor Bappeda Kota Sukabumi.

3. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang data-data berupa aktivitas, fasilitas serta kelebihan maupun kekurangan yang akan mendukung perencanaan perancangan. Wawancara dilakukan dengan Ibu Ika selaku Kepala Subbagian Umum. Wawancara berlangsung selama 15 menit, yang berisikan tentang:

- Latar belakang Kantor Bappeda Kota Sukabumi
- Fasilitas yang ada di Kantor Bappeda Kota Sukabumi
- Hal-hal yang berkaitan dengan bangunan Kantor Bappeda Kota Sukabumi
- Aktivitas staf pada ruang Kantor Bappeda Kota Sukabumi

1.6.2 Tahapan Pengumpulan Data Sekunder

1. Studi Literatur

Mengumpulkan informasi data dari berbagai sumber tertulis, serta buku-buku, artikel, arsip dan jurnal yang terkait dengan studi kasus yang ditemukan. Studi literatur digunakan untuk mendapatkan berbagai informasi mengenai objek yang akan diteliti. Kemudian dijadikan acuan dan referensi dalam proses perancangan ulang interior Kantor Bappeda Kota Sukabumi.

2. Studi Banding

Studi banding dilakukan pada 3 objek dengan tipologi yang sama dengan Kantor Bappeda Kota Sukabumi, yaitu:

- Objek 1 : Kantor Bappelitbangda Kabupaten Cianjur
- Objek 2 : Kantor Bappeda Kota Tangerang
- Objek 3 : Kantor Bappeda Kota Denpasar

3. Studi Preseden

Studi preseden yang menjadi acuan atau referensi pada perancangan ini adalah Kantor Bapennas RI. Alasan pemilihan objek studi preseden ini adalah merupakan klasifikasi kantor yang sama yaitu instansi Pemerintah, dan penerapan konsep *Coworking Space* / *Open Space* pada interior kantor. Sehingga dari hasil komparasi objek dapat ditemukan referensi atau acuan untuk memperbaiki permasalahan yang ada pada objek perancangan.

1.7 MANFAAT PERANCANGAN

Adapun manfaat yang didapat dari perancangan ulang interior Kantor Bappeda Kota Sukabumi adalah sebagai berikut:

a. Manfaat bagi Masyarakat / Komunitas

Bisa menjadi referensi dalam pembelajaran untuk mahasiswa yang akan mendesain ulang suatu bangunan khususnya kantor pemerintahan dan menambah ilmu pengetahuan tentang rancangan kantor sesuai dengan standar.

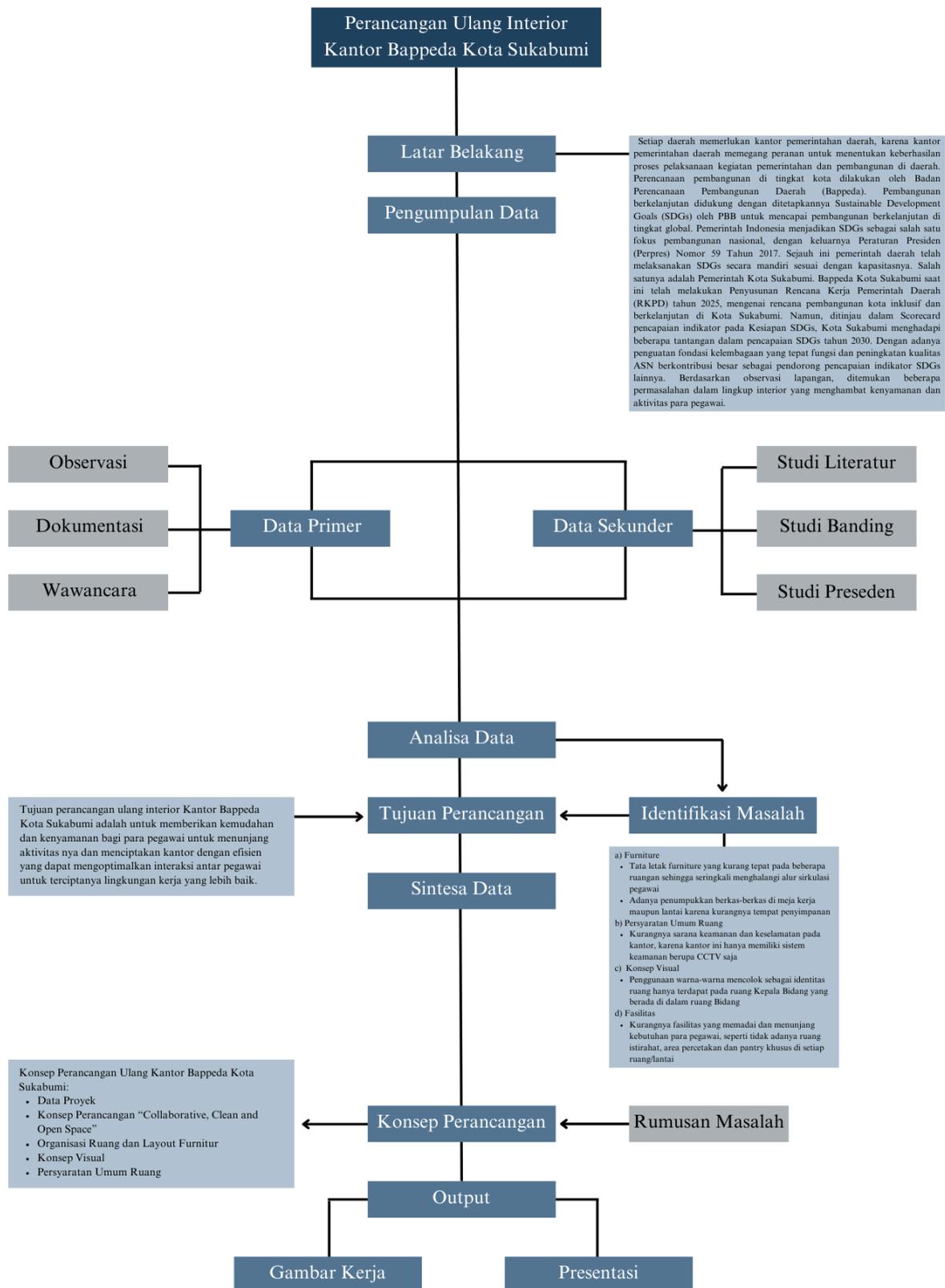
b. Manfaat bagi Institusi Penyelenggara Pendidikan

Data hasil penelitian serta hasil desain dapat dijadikan sebagai sumber kajian tambahan bagi institusi untuk studi mengenai perancangan ulang interior kantor pemerintahan dan dapat dijadikan acuan bagi mahasiswa lainnya yang memiliki proyek perancangan serupa.

c. Manfaat bagi Keilmuan Interior

Dapat mewujudkan perancangan ulang interior Kantor Bappeda Kota Sukabumi yang baik sesuai dengan standar dan aturan serta fasilitas yang dibutuhkan oleh pengguna ruang.

1.8 KERANGKA PIKIR PERANCANGAN



Bagan 1. 1 Kerangka Berpikir

(Sumber: Analisis Pribadi)

1.9 PEMBABAN LAPORAN TA

Sistematika penulisan pada proposal ini antara lain sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Berisi uraian-uraian latar belakang pengangkatan perancangan ulang interior Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung Barat, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan dan sasaran, ruang lingkup dan Batasan masalah, manfaat perancangan, metode perancangan, kerangka berpikir, dan sistematika penulisan.

BAB 2 : KAJIAN PUSTAKA DAN REFERENSI DESAIN

Berisi uraian-uraian mengenai kajian literatur mulai dari kantor secara umum hingga kantor pemerintahan serta kajian literatur mengenai pendekatan, analisa studi kasus bangunan sejenis.

BAB 3 : DESKRIPSI PROYEK DAN DATA ANALISIS

Berisi uraian-uraian mengenai data proyek, dan analisa data proyek mulai dari analisis site, analisis kasus perancangan, analisis studi banding, analisis perancangan mulai dari analisis kebutuhan aktivitas hingga analisis elemen interior.

BAB 4 : TEMA DAN KONSEP IMPLEMENTASI PERANCANGAN

Berisi uraian-uraian mengenai tema perancangan, konsep perancangan, organisasi ruang, layout, bentuk, material, warna, pencahayaan dan penghawaan, keamanan dan akustik beserta pengaplikasiannya pada Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung Barat.

BAB 5 : KESIMPULAN DAN SARAN

Merupakan bagian akhir dari penulisan laporan yang berisi tentang kesimpulan dan saran.